

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan sektor publik berfungsi sebagai cerminan jalannya proses penggunaan dana masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pembelanjaan, serta mekanisme pengawasannya. Dokumen ini memiliki peran krusial sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap keuangan negara yang diolah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Keberadaan laporan keuangan utamanya dimanfaatkan untuk mengidentifikasi jumlah sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam operasional pemerintahan, menganalisis kondisi finansial, menilai tingkat efektivitas serta efisiensi suatu unit pelaporan, dan memastikan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku.

Laporan keuangan pemerintah berfungsi untuk wujud akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola dana publik, baik yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun berbagai transaksi lainnya. Akan tetapi, apabila kualitas laporan keuangan rendah, informasi yang disajikan dapat menjadi kurang tepat bagi para pengambil keputusan. Ketidaktepatan informasi ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam merumuskan kebijakan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kemajuan suatu institusi.

Laporan keuangan pemerintah mencakup tujuh elemen utama, yaitu neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta catatan atas laporan keuangan. Setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan karena kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada tingkat pertanggungjawaban yang diberikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan harus memenuhi beberapa kriteria, yakni relevan, andal, dapat diperbandingkan, serta mudah dipahami. Jika laporan keuangan mampu memenuhi karakteristik tersebut, maka dapat dikatakan transparan dan akuntabel.

Setiap tahunnya, laporan keuangan pemerintah dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk opini audit. Apabila BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka laporan keuangan dianggap telah disusun dan disajikan dengan baik. Sebaliknya, jika BPK mengeluarkan opini Tidak Wajar atau bahkan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), maka laporan keuangan dinilai tidak memenuhi standar dan dianggap buruk.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2020 dan memberikan opini tidak wajar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang signifikan, sebagaimana dijelaskan oleh BPK, yang mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tidak tersaji secara benar. Salah satu faktor utama adalah ketiadaan persetujuan dari DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang, dan jasa yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan rincian dalam APBD, karena telah dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan pengakuan beban dalam laporan operasional. Akibat dari perubahan tersebut, belanja pegawai ditampilkan lebih rendah dari yang seharusnya, sedangkan belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dalam penyajiannya. Selain itu, ditemukan juga adanya kewajiban jangka pendek yang tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai. Ketidaksesuaian lainnya tampak dalam pencatatan serta realisasi aset tetap, seperti jalan, irigasi, dan jaringan, khususnya dalam hal rehabilitasi, renovasi, serta pemeliharaan, yang tidak dikategorikan dengan benar ke dalam aset induknya. Dampak dari hal tersebut adalah perhitungan beban dan akumulasi penyusutan menjadi tidak akurat. Dengan berbagai permasalahan ini, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2020 menghadapi sejumlah kendala dalam hasil pemeriksaannya.

Dari beberapa masalah yang terjadi, bisa dibayangkan jika laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jember tahun 2020 dinilai sangat buruk karena tidak memenuhi karakteristik sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Inilah alasan dalam penelitian ini guna mengkaji lebih jauh beberapa kemungkinan yang dapat menjadi faktor yang memengaruhi kualitas laporan

keuangan daerah kabupaten Jember. Studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap mutu laporan keuangan, termasuk keahlian tenaga kerja, pemahaman terhadap basis akrual, mekanisme pengendalian internal, serta penggunaan teknologi informasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Irzal Tawaqal dan Suparno (2017) dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pada SKPD di wilayah Kota Banda Aceh dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, serta implementasi teknologi informasi.

Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh faktor kompetensi sumber daya manusia. SDM yang mempunyai keahlian memadai sangat diperlukan dalam menjalankan sistem akuntansi yang tersedia serta memahami logika akuntansi dengan baik. Kemampuan ini tentu harus didukung oleh latar belakang pendidikan di bidang akuntansi serta pengalaman dalam sektor keuangan. Apabila kedua aspek tersebut terpenuhi, maka sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan optimal, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

Faktor lain yang turut memiliki pengaruh bagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yakni tingkat pemahaman mengenai peraturan dalam sistem akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini sangat penting dan sangat dibutuhkan karena dengan menggunakan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual maka pengukuran kinerja akan menjadi lebih baik kemudian manajemen keuangan atau aset dapat terfasilitasi dengan lebih transparan dan akuntabel. Akan tetapi pemahaman regulasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual cukup kompleks sehingga untuk memahami konsep akuntansi tersebut membutuhkan pemahaman yg lebih mendalam. Salah satu akibat yang akan ditimbulkan akibat rendahnya keterampilan dalam pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah rendahnya kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis akrual memiliki peran penting dalam menentukan mutu laporan keuangan. Dengan menerapkan sistem akrual, diharapkan laporan keuangan pemerintah dapat disajikan secara lebih

transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan informasi yang jelas terkait pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap mutu laporan keuangan adalah mekanisme pengendalian internal. Dalam sebuah organisasi, mekanisme ini berperan sebagai langkah kontrol, terutama dalam pengelolaan sistem informasi, dengan tujuan memastikan ketepatan serta kelengkapan data yang disajikan. Keberadaan sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan mampu meningkatkan keakuratan serta keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan (Warren et al., 2005). Implementasi pengendalian internal yang optimal dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem ini perlu dirancang agar selaras dengan setiap unit serta fungsi terkait, sehingga dapat terintegrasi secara menyeluruh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Faktor lain yang bisa memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yakni penerapan sistem informasi berbasis teknologi, seiring berkembangnya zaman segala sesuatu dilakukan menggunakan sistem dan komputerisasi. Dengan menerapkan teknologi informasi segala pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yakni sebuah laporan kinerja dan pengelolaan keuangan oleh kepala daerah atas amanah yang diberikan kepadanya dalam hal pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pada satu periode tertentu. Karena berasal dari rakyat, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan atas dana APBD melalui laporan keuangan pemerintah adalah penting sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Jember?

2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Jember?
3. Apakah Pemahaman Basis AkruaI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Jember?
4. Apakah Penerapan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji serta menguraikan dampak kemampuan tenaga kerja terhadap mutu laporan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Jember.
2. Meneliti dan menjelaskan efek sistem kontrol internal terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintahan Kabupaten Jember.
3. Mengevaluasi serta memaparkan pengaruh pemahaman konsep akruaI terhadap tingkat keakuratan laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Jember.
4. Menelaah serta menggambarkan dampak implementasi teknologi informasi terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan di pemerintahan Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini bisa memberikan informasi dan wawasan bagi :

1. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dengan menerapkan teori dalam situasi nyata, peneliti dapat menguji sejauh mana konsep yang telah dipelajari sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi. Selain itu, pengalaman langsung di lapangan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait tantangan serta dinamika yang mungkin tidak sepenuhnya tergambar dalam teori. Melalui proses ini, peneliti dapat mengembangkan keterampilan analitis, pemecahan masalah, serta adaptasi terhadap berbagai kondisi yang ada di dunia nyata.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai sistem informasi akuntansi, baik dari segi konsep, implementasi, maupun dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi studi selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas dan pengembangan sistem informasi akuntansi dalam berbagai sektor. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para akademisi, praktisi, serta pembuat kebijakan dapat memperoleh referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam merancang strategi atau kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi di masa depan.